

ANALISIS DISPARITAS SEKTORAL UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL SAAT COVID-19

Meisyaroh Catur Wulandari¹, Rayhan Arya Wicaksono², Maulia Siti Mukharohmah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

¹meisyarohcatur@gmail.com*, ²rayhan_wicaksono@yahoo.com,

³mauliasm@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Disparitas masyarakat berkaitan dengan adanya kemiskinan pada di suatu daerah. Suatu daerah perlu mengetahui seberapa besar disparitas sektoral serta mengetahui potensi daerah. Kabupaten Bantul selama pandemic covid-19 yang terhitung dari tahun 2020-2022 menempati posisi ke-2 se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 138,59 ribu penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat disparitas sektoral serta memetakan potensi daerah melalui sektor basis ekonomi Kabupaten Bantul di masa pandemic covid-19. Alat analisis yang digunakan meliputi analisis indeks entropi theil dan analisis location quotient (LQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sektoral bernilai di bawah 0,5 artinya disparitas ekonomi masih dikatakan rendah, serta diketahui sektor basis ekonomi meliputi sektor-sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kata Kunci : Disparitas Ekonomi, Potensi Wilayah, Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

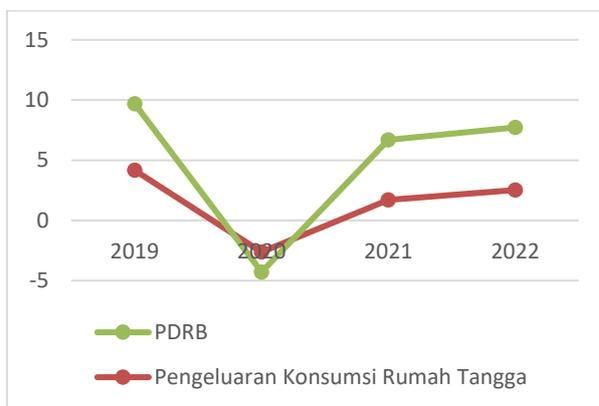
Community disparities are related to the existence of poverty in an area. So that a region needs to know how big the sectoral disparity is and know the potential of a region. During the Covid-19 pandemic, Bantul Regency, which counted from 2020-2022, occupies the 2nd position in the Province of the Special Region of Yogyakarta with an average poverty rate of 138.59 thousand residents. This study aims to determine the level of sectoral disparities and map regional potential through the economic base sector of Bantul Regency during the Covid-19 pandemic in 2020-2022. The analytical tools used include theil entropy index analysis and location quotient (LQ) analysis. Sectoral disparity is below 0.5, meaning that economic disparity is still low, and it is known that the economic base sector includes agriculture, forestry and fisheries; processing industry sector; electricity and gas procurement sector; wholesale and retail trade sector as well as car and motorcycle repair; transportation and warehousing sector; the sector of providing accommodation and food and drink.

Keywords: Economic Disparity, Regional Potential, Poverty Alleviation

1. PENDAHULUAN

Beberapa negara sedang mengalami dampak dari adanya wabah covid-19 tahun 2020. Begitupun Indonesia mengalami guncangan ekonomi dari adanya wabah covid-19. Upaya pemerintah pada saat terjadinya wabah yakni melakukan pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat (Budiani et al., 2022). Hal tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19. Namun, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami pergeseran atau lesu (Shinta Iffah Rosyidah, 2022; Sitepu & Rahmawati, 2022).

Sektor ekonomi ketika pandemic covid-19 menurut lapangan usaha banyak yang mengalami pergeseran (BPS, 2022a). Ditandai dengan menurunnya nilai PDRB dari tahun sebelum pandemic covid-19 dan saat pandemic covid-19. Nilai PDRB untuk melihat perekonomian wilayah suatu daerah (Budiani et al., 2022). Bila dilihat dari gambar 1, nilai PDRB tahun 2020 mengalami penurunan signifikan hingga bernilai negatif.



Gambar 1. Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2019-2022
 Sumber: BPS, data diolah

Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengikuti nilai pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang memerlukan mobilitas

tinggi terpaksa harus dibatasi. Peraturan pembatasan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keamanan kesehatan bagi masyarakat. Efeknya, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan kontrak kerja. Pertumbuhan pengangguran semakin banyak dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang menurun. Sehingga menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan dalam perputaran ekonomi. Ditandai dengan nilai pengeluaran rumah tangga. Banyak rumah tangga yang terpaksa harus menyesuaikan kebutuhan rumah tangganya.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa atau berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara demografis, letaknya berada di selatan sisi Kota Yogyakarta. Potensi sumber daya alam yang dimiliki sangat berlimpah. Dikutip dari BPS, (2022b) populasi penduduk tahun 2021 mencapai 985,77 juta jiwa. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,72%.

Aktivitas ekonomi yang terganggu berpengaruh pada pola pergeseran sektor ekonomi. Berdasarkan gambar 2 tercatat 17 (tujuh belas) sektor mengalami fluktuatif. Sektor yang meningkat di setiap tahunnya adalah sektor informasi dan komunikasi, disusul oleh industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sektor terendah tercatat di 3 (tiga) sektor; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pertambangan dan penggalian.

Sebanyak 17 sektor yang tercatat perlu diketahui mana saja sektor basis yang terbaik di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan memfokuskan perencanaan yang tepat dalam sektor basis maka mampu mengembangkan perencanaan pembangunan, menyerap tenaga kerja, dan menambah tingkat kemakmuran masyarakat.



Gambar 2. PDRB ADHK 1010 tahun 2020-2022
 Sumber: BPS, data diolah

Paska pandemi covid-19 banyak sektor yang menurun. Nyatanya sektor ekonomi Kabupaten Bantul itu sedang meningkat. Dampak pandemic covid-19 yang sangat masif menjadikan beberapa wilayah mengalami ketimpangan regional (Mahardiki & Santoso, 2013; Rachmawati et al., 2020). Ketimpangan yang terjadi dikarenakan pendapatan di masyarakat tidak merata. Pemulihan ekonomi di berbagai sektoral sangat memerlukan waktu untuk bergerak meningkat. Berdampingan dengan permasalahan ketimpangan di masyarakat yang besar, memunculkan ketimpangan regional. Ketimpangan regional ada akibat perbedaan sumberdaya, faktor produksi, dan kebijakan masing-masing daerah (Mahardiki & Santoso, 2013; Mulyanto & Rachmawati, 2021).

Pemahaman tentang ketimpangan ekonomi bukan hanya berkaitan dengan ketidaksetaraan, namun juga disebabkan dari ketidakmeratanya peluang atau kesempatan bekerja (Mahardiki & Santoso, 2013). Tingkat pengangguran berkaitan dengan kondisi kemiskinan (Digdowiseiso et al.,

2023). Dua hal di atas cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal disuatu daerah dan mengukur bagaimana ketimpangan ekonomi terjadi.

Dengan tingkat kinerja keuangan daerah otonomi khusus, sudah selayaknya pemangku kebijakan tidak hanya diam dalam menghadapi permasalahan ini. Terbentuklah beberapa upaya untuk mendongkrak kemajuan dari sektor – sektor yang terkena dampak covid di daerah. Dalam beberapa kasus nasional, mulai dibukakan pintu masuk di sektor pariwisata, penjualan komoditas bisa menggunakan ekspedisi kembali dalam distribusi perdagangannya, dan lain sebagainya.

Pendekatan pembangunan masa kini cenderung bersifat sektoral. Ketimpangan sektoral terjadi karena dukungan pemerintah terhadap sektor tertentu yang berlebihan. Mengakibatkan terjadinya perbedaan efisiensi dan produktivitas antar sektor. Dalam pandangan mikro, ketimpangan sektoral juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi yang bekerja di suatu sektor dan pelaku ekonomi di sektor lainnya. Dalam isu pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran suatu bangsa, kenaikan pendapatan tidaklah cukup namun juga harus mampu memperbaiki taraf hidup mereka yang miskin.

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul termasuk dalam daerah hinterland dengan interaksi tinggi dengan Kota Yogyakarta tahun 2017. Dan ketika tahun 2020 sektor unggulan di Kabupaten Bantul tidak memiliki nilai yang tinggi (Sitorus, 2016). Berbeda dengan studi kasus di Jawa Timur, dengan tingkat ketimpangan kota yang tinggi. Dari penelitian Ananda & Prabowo (2021) Kota Surabaya

sebagai pusat administrasi di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai disparitas nilai 0,9. Di Kota Batu menggunakan alat analisis yang sama untuk melihat ketimpangan daerah yakni menggunakan indeks entropi theil menunjukkan bahwa disparitas di Kecamatan Junrejo lebih tinggi dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Dalam penelitian tersebut, terbukti ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan disparitas yang terjadi di Kota Batu.

Selama 9 tahun dalam penelitian Digdowiseiso et al. (2023) melihat tingkat kemiskinan empat provinsi yang memiliki otonomi khusus meliputi (NAD, DIY, Papua Barat, dan Papua. Provinsi DIY menempati angka kemiskinan paling rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki otonomi khusus. Melihat sektor unggulan Kabupaten Bantul yang dirata-rata dari tahun 2014-2018 dalam penelitian Saraswati (2021) terdapat 4 sektor unggulan yakni sektor pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Ke-empat sektor tersebut yang dapat dikembangkan untuk mendampingi sektor industri pengolahan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya penelitian yang melihat bagaimana kondisi disparitas sektoral di Kabupaten Bantul saat pandemic covid-19 yakni antara tahun 2020-2022. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar disparitas sektoral di Kabupaten Bantul dengan analisis Indeks Entropi Theil dan mengetahui sektor basis Kabupaten Bantul agar diketahui penyerapan tenaga kerja ke depannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan yakni berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul yang didapatkan melalui website resmi (BPS, 2022b). Tahun penelitian yakni hanya berfokus ketika pandemic covid-19 meliputi tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut bersifat data tahunan. Data-data yang digunakan berupa data *time series* tahunan berupa data produk domestic regional bruto ADHK 2010 Kabupaten Bantul beserta data primer yang bersumber dari website, jurnal, artikel hingga penelitian-penelitian serupa.

Guna mempermudah analisis data, berikut merupakan kode dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Tahun 2010:

Tabel 1. Kode Lapangan Usaha ADHK 2010

Kode	Lapangan Usaha [Seri 2010]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estate
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kode	Lapangan Usaha [Seri 2010]
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa lainnya

Sumber: BPS, data diolah

Teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan 2 alat analisis ekonomi:

1. Indeks Entropi Theil

Merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui angka ketimpangan di suatu daerah atau sector (Sutrisno,2012; Mauliddiyah, 2014 ;Kuncoro,2019). Perhitungan indeks entropi theil yakni:

$$l(y) = - \sum PiLn(Pi)$$

Keterangan:

l(y) = indeks entropi theil;

Pi = nilai sector PDRB suatu daerah / PDRB total;

Ln = log natural dari Pi.

Dalam Kuncoro (2019) disebutkan nilai atau indeks entropi theil ketika mendekati angka nol (0) maka distribusi pendapatan sempurna, sebaliknya ketika mendekati angka satu (1) maka ketimpangan semakin besar.

2. Location Quotient (LQ)

Merupakan alat analisis ini digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu daerah (Sutrisno, 2012; Umiyati, 2012).

$$LQ = \frac{ps/pl}{Psp/Plp}$$

Dengan keterangan diatas yakni

LQ = location quotient/sector basis ekonomi;

ps = produksi sektor i tingkat lokal;

pl = produksi total pada tingkat lokal;

Psp = produksi sektor I pada tingkat provinsi;

Plp = produksi total pada tingkat provinsi.

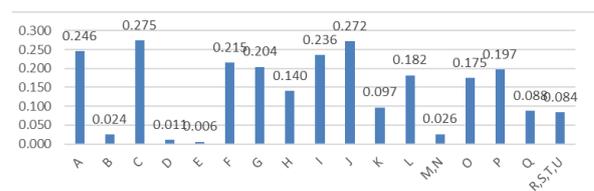
Menurut Kuncoro (2019) analisis LQ adalah analisis sectoral secara historis. Nilai perhitungan LQ ketika bernilai > 1 maka sector tersebut menjadi sector basis, ketika nilai LQ bernilai < 1 maka bukan sector basis (Tarigan, 2005)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Analisis Indeks Entropi Theil

Hasil analisis Indeks Entropi Theil (ET) di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa nilai tertinggi yakni 0,275. Hal tersebut terjadi pada sector C atau industri pengolahan. Nilai ketimpangan regional berkisar di angka 0,006 hingga 0,275 di tahun 2020 hingga 2022. Ketimpangan sektoral masih dinilai aman, nilai entropi theil tidak mendekati angka 1.



Gambar 1. Analisis Indeks Entropi Theil
 Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan hasil dari perbandingan tingkat disparitas sektoral mulai tahun 2020 hingga 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perbandingan Entropi Theil 2020-2022

KODE	2020	2021	2022
A	0.25	0.24	0.24
B	0.03	0.02	0.02
C	0.28	0.27	0.27

KODE	2020	2021	2022
D	0.01	0.01	0.01
E	0.01	0.01	0.01
F	0.21	0.22	0.22
G	0.21	0.20	0.20
H	0.14	0.14	0.15
I	0.23	0.23	0.24
J	0.26	0.28	0.27
K	0.10	0.10	0.10
L	0.19	0.18	0.18
M,N	0.03	0.03	0.03
O	0.18	0.17	0.17
P	0.20	0.20	0.19
Q	0.09	0.09	0.09
R,S,T,U	0.08	0.08	0.09

Sumber: BPS, data diolah

Hasil analisis Indeks Entropi Theil tahunan di setiap sector terdapat sector yang stagnan dan sector yang mengalami penurunan maupun kenaikan. Berikut sector yang mengalami nilai yang tetap yakni dengan kode D Pengadaan Listrik dan Gas; E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; K Jasa Keuangan dan Asuransi; M,N Jasa Perusahaan; Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan kesenjangan atau disparitas yang meningkat yakni F Konstruksi; H Transportasi Pergudangan; I Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; R,S,T,U Jasa Lainnya. Namun lebih banyak sector yang mengalami penurunan kesenjangan saat pandemic covid-19 tahun 2020-2022 yakni dilihat dari perbandingan angka indeks entropi theil yang menurun dari tahun ke tahun.

3.1.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Berdasarkan dari hasil analisis Location Quotient (LQ) terlihat bahwa terdapat sector basis di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor basis yakni sector yang dapat dilihat dari perhitungan produksi sektoral di wilayah penelitian. Hasil analisis LQ, nilai sector basis paling besar yakni pada sector A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 1,383 dan nilai sector basis paling rendah 0,733 yakni pada sector jasa lainnya. Terdapat enam (6) sector basis, dan sector lainnya merupakan sector non-basis.

Tabel 3. Hasil Analisis LQ

KODE	2020	2021	2022	Rata-rata
A	1.376	1.397	1.378	1.383
B	0.981	0.965	0.964	0.970
C	1.162	1.173	1.188	1.174
D	1.042	1.048	1.051	1.047
E	0.823	0.826	0.842	0.830
F	0.905	0.909	0.910	0.908
G	1.031	1.033	1.033	1.032
H	1.018	1.041	1.020	1.026
I	1.206	1.207	1.202	1.205
J	0.929	0.930	0.930	0.930
K	0.739	0.747	0.749	0.745
L	0.940	0.942	0.943	0.942
M,N	0.476	0.472	0.471	0.473
O	0.922	0.926	0.921	0.923
P	0.831	0.827	0.828	0.829
Q	0.732	0.734	0.734	0.733
R,S,T,U	0.859	0.795	0.784	0.813

Sumber: BPS, data diolah

Hasil analisis Location Quotient (LQ) terdapat beberapa sector basis. Dilihat dari nilai rata-rata LQ > 1. Sektor basis di Kabupaten Bantul meliputi sector A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,383); C Industri Pengolahan (1,174); D Pengadaan Listrik dan Gas (1,047); G Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,032); H Transportasi dan Pergudangan (1,026); I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,205).

3.2. Pembahasan

Hasil disparitas sektoral di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil disparitas yang tidak terlalu tinggi. Melalui analisis indeks entropi theil yang diperoleh ketika

tahun pandemi covid-19 yakni tahun 2020 hingga 2022 mencapai rata-rata di bawah 0,5. Masa pandemi covid-19 yang membuat beberapa sektor ekonomi menjadi lesu, menyebabkan nilai ketimpangan yang fluktuatif. Hal ini dibuktikan dari nilai indeks entropi theil yang naik turun. Dampak dari covid-19 membuat perputaran ekonomi menjadi tidak bebas. Adanya pembatasan sosial membuat kenaikan nilai kesenjangan di beberapa sektor. Pembatasan aktivitas ekonomi tersebut berefek pada sektor-sektor yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi seperti sektor konstruksi, sektor transportasi perhubungan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta pada sektor jasa lainnya. Peran tenaga kerja ketika kondisi ekonomi tidak stabil menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari sektor sebelum pandemic ke sektor yang dirasa lebih *safety* dan menguntungkan. Berbeda dengan hasil penelitian Sutrisno (2012) yang melihat kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen (Barlingmascakeb) tahun 2007 hingga 2010 dengan indeks entropi theil menunjukkan angka ketimpangan yang tinggi yakni di angka 0,7. Nilai tersebut mendekati angka 1 yang menunjukkan nilai ketimpangan yang besar (Kuncoro, 2019). Di Jawa Timur angka ketimpangan pendapatan juga masih menunjukkan angka yang tinggi yakni bernilai di atas 0,9. Namun dilihat dari korelasi yang diujikan melalui hipotesis Kuznets, tidak terdapat hubungan positif antara pembangunan dan kesenjangan wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur (Afandi et al., 2019). Diperkuat dari penelitian Ananda & Prabowo (2021) dengan topik penelitian di Jawa Timur, kota yang memiliki kecenderungan disparitas pendapatan tinggi yakni Kota Surabaya dan Kota Kediri. Ketimpangan tahun 2019 di 9

kabupaten dan kota di Provinsi Bali menunjukkan angka yang tidak tinggi yakni 0,26. Hal itu disampaikan pada penelitian Luthfiyah & Tallo (2020) ketimpangan ekonomi tersebut menurun dari tahun penelitian sebelumnya.

Setelah mengetahui kesenjangan pada sektor ekonomi di Kabupaten Bantul, selanjutnya peneliti melihat sektor-sektor mana saja yang dapat dimaksimalkan. Berdasarkan analisis menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ) masih terdapat sektor yang mampu untuk diekspor keluaran produksinya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai basis yang tinggi dapat dikatakan dengan nilai PDRB sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang lebih optimal. Sektor pertanian menyumbangkan sebesar 11% dalam PDRB Kabupaten Bantul. Sektor akomodasi makan minum juga menjadi sektor basis di Kabupaten Bantul, pemerintah dapat memfasilitasi para wiraswasta yang termasuk dalam sektor tersebut. Peran sektor informal yang masuk dalam kategori sektor akomodasi makan minum menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang termasuk dalam sektor tersebut. Serta industri pengolahan yang meliputi pengolahan makanan, minuman, kimia, dan lain-lain yang menyertakan proses perubahan dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Bali memiliki kesamaan dari segi kota-kota pariwisata dan pertumbuhan UMKM. Seperti halnya di Provinsi Bali yang memiliki daya tarik wisatawan yang tinggi, sektor penyedia akomodasi makanan dan minum serta sektor pengolahan menjadi sektor basis sebelum masa pandemic-19 (Luthfiyah & Tallo, 2020). Secara geografis Kabupaten Bantul masih banyak dijumpai area persawahan

yang terletak di sisi selatan Jawa, sehingga potensi pertanian, kehutanan dan perikanan masih sangat bisa dioptimalkan (Rachmawati et al., 2020; Mulyanto & Rachmawati, 2021). Sejalan dengan penelitian Widyaningrum & Cahyono (2020) di Ngawi, tahun 2015 hingga 2019, Kabupaten Ngawi memiliki sector basis pada sector pertanian dengan nilai kontribusi sebesar 30% dari total PDRB Kabupaten Ngawi. Sehingga output produk pertanian dapat dialokasikan ke kabupaten lain sekitarnya.

4. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pergeseran kinerja ekoomi di Kabupaten Bantul, namun nilai ketimpangan sectoral termasuk dalam kategori tidak tinggi.

Sektor basis Kabupaten Bantul meliputi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan; sector penyediaan akomodasi dan makan minum, sector industri pengolahan, sector pengadaan listrik dan gas, sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sector transportasi dan pergudangan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Bantul bekerja pada sector pertanian, peternakan, dan perikanan maka pemerintah harus memprioritaskan perbaikan kualitas SDM pada bidang tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memaksimalkan potensi sector basis lain. Hal ini harus diupayakan agar produktivitas para pekerja di sector basis Kabupaten Bantul dapat lebih optimal lagi. Selain itu, dengan diketahuinya sector basis ekonomi Kabupaten Bantul dapat lebih focus menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung sector basis ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, F., Jumiati, A., & Adenan, M. (2019). Analisis Tipologi Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Basis Dan Disparitas Pendapatan. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.32662/golder.v2i2.563>
- [2] Ananda, A. R. O. R., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pengujian Hipotesis Kuznet di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 196–205. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/40625>
- [3] BPS. (2022a). Kabupaten Bantul Dalam Angka 2022. In *BPS*.
- [4] BPS. (2022b). *PDRB ADHK 2010 Tahun 2020-2022*. BPS. <https://bantulkab.bps.go.id/indicator/52/37/1/pdrb-seri-2010-kabupaten-bantul-menurut-lapangan-usaha.html>
- [5] Budiani, S. R., Rumboirusi, W. C. B., & Ismya, H. M. (2022). Kondisi Ketenagakerjaan dan Sektor Unggulan selama. *Media Komunikasi Geografi*, 23(2), 217–226.
- [6] Digdowiseiso, K., Rahardian, T., & Hartami, L. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Empat Provinsi Otonomi Khusus Periode 2013-2021. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba*, 5(4), 2374–2100. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i4.3460>
- [7] Kuncoro, M. (2019). *Ekonomi Regional : Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada.
- [8] Luthfiyah, U., & Tallo, A. J. (2020). Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2019. *Aksara: Jurnal Ilmu*

- Pendidikan Nonformal*, 6(3), 241–248.
<https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.241-248.2020>
- [9] Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 179–193.
- [10] Mauliddiyah, A. (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). *Jesp*, 6(2), 156–163. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/download/5108/1839>
- [11] Mulyanto, J. D., & Rachmawati, L. (2021). Analisis Sektor Potensial Dan Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Independent*, 1(2013), 124–140.
- [12] Rachmawati, L., Cahyono, H., Nugraha, J., Watjuba, L., & Hanifa, N. (2020). Shift Share analysis Indonesia masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(3), 165–178. <https://doi.org/10.21067/jem.v16i3.5042>
- [13] Saraswati, N. A. (2021). Daya Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau dari Potensi Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bantul. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3067>
- [14] Shinta Iffah Rosyidah. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 296–316. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1111>
- [15] Sitepu, V. V., & Rahmawati, F. (2022). Analisis pusat pertumbuhan dan sektor ekonomi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. *AKUNTABEL*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i1.10710>
- [16] Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sosio Informa*, 2(1), 89–101. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190>
- [17] Sutrisno, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 42–49.
- [18] Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Edisi Revisi). PT Bumi Aksara.
- [19] Umiyati, E. (2012). Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi. *Paradigma Ekonomi*, 1(5), 15–21.
- [10] Widyaningrum, E. D. A., & Cahyono, H. (2020). Pemetaan Potensi Wilayah Guna Mendorong Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2).

BIODATA PENULIS

Penulis 1

Nama	:	Meisyaroh Catur Wulandari
Instansi	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
Alamat Instansi	:	Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email	:	meisyarohcatur@gmail.com
No-HP	:	089634771477
Alamat	:	Jl Asahan II no 234, Kec Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57125

Penulis 2

Nama	:	Rayhan Arya Wicaksono
Instansi	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
Alamat Instansi	:	Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email	:	rayhan_wicaksono@yahoo.com

Penulis 3

Nama	:	Maulia Siti Mukharohmah
Instansi	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
Alamat Instansi	:	Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email	:	mauliasm@student.uns.ac.id